

ABSTRAK

Kedaulatan suatu negara sebagai konsep hukum Internasional memiliki tiga aspek utama yaitu eksternal, internal dan wilayah (teritorial). Aspek teritorial dari kedaulatan itu adalah kekuasaan satu-satunya serta menyeluruh yang dijalankan oleh negara terhadap semua orang dan benda yang terdapat di bawah maupun diatas udara wilayah tersebut. Merupakan hak dari setiap negara untuk menjalankan yurisdiksinya terhadap wilayahnya dan terhadap semua orang dan benda yang ada di dalamnya, kecuali terhadap hak-hak kebebasan yang diakui menurut hukum Internasional. Hak yurisdiksi suatu negara merupakan pencerminan dari kewajiban negara-negara lain untuk tidak menjalankan yurisdiksinya di dalam wilayah itu kecuali atas izin dari negara yang bersangkutan.

Institusi Imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing, tidak saja menimbulkan konsekuensi tuntutan peranan yang optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian menyangkut orang asing, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Perpindahan penduduk dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain merupakan salah satu sebab timbulnya berbagai permasalahan keimigrasian. Pelanggaran dan kejahatan keimigrasian pun akan timbul dengan datangnya orang asing di wilayah Indonesia, menyikapi akan hal tersebut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing akan diambil tindakan tegas.

Dengan begitu banyaknya permasalahan mengenai Keimigrasian yang dapat mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia, dibutuhkan suatu upaya nyata untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui instrumen kebijakan oleh pemerintah dan Dirjend. Keimigrasian yang berupa dokumen keimigrasian serta pengawasan terkait status keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. diharapkan dapat menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia dari pengaruh global dunia.

Kata Kunci : Kedaulatan, orang asing, institusi imigrasi, pemerintah, pelanggaran keimigrasian, kejahatan keimigrasian, tindakan keimigrasian, dokumen keimigrasian, pengawasan.